

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM
(DAU) DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bidang anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025)**



TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Manajemen (M.M) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Magister Manajemen**

Oleh

**LEO TARNANDO
NPM. 2361101024**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM
(DAU) DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bidang anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025)**



Diajukan Oleh :

**LEO TARNANDO
NIM. 2361101024**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Ahmad Juhaidi, S.E., M.Si
NIDN: 0271710102

Pembimbing II,

Dr. Rina Yuniarti, S.E., M.Ak
NIDN: 0210068101

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,



Furqonti Raniyah, S.E., M.M
NIDN. 0208047301

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang
anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025)**

Oleh

**LEO TARNANDO
NIM. 2361101024**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
27 November 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dewan Penguji :

1. **Dr. Yusmaniarti, S.E., M.M**
NIDN. 0225057501
2. **Dr. Meilaty Finthariasari, S.E., M.M**
NIDN. 0226058802
3. **Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si**
NIDN. 0271710102
4. **Dr. Rina Yuniarti, S.E., M.Ak**
NIDN. 0210068101

Tanda Tangan :

Meilaty

.....

Yusmaniarti

.....

Ahmad Junaidi

.....

Rina Yuniarti

.....

Bengkulu, November 2025

Dekan



Furqonti Ranidiah

Furqonti Ranidiah, S.E., M.M
NIDN. 0208047301

PERNYATAAN

Saya, (Leo Tarnando, NPM 2361101024), menyatakan bahwa;

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bengkulu, 27 November 2025

Yang Menyatakan



LEO TARNANDO
NPM. 2361101024

DECLARATION

I am Leo Tarnando, NPM 2361101024, declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in University of Muhammadiyah Bengkulu or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true; if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulations in University of Muhammadiyah Bengkulu.

Bengkulu, 27 November 2025

Declared by,



LEO TARNANDO
NPM. 2361101024

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT
kupersembahkan karya ini untuk orangtua dan
keluarga kecilku tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025)”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Manajemen pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu **Furqonti Ranidiah, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu **Dr. Meilaty Finthariasari, S.E., M.M** selaku Ketua Program Studi
3. Bapak **Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si** selaku Pembimbing Utama.
4. Ibu **Dr. Rina Yuniarti, S.E., M.Ak** selaku Pembimbing Pendamping.
5. Ibu **Dr. Yusminiarti, S.E., M.M** dan Ibu **Dr. Meilaty Finthariasari, S.E., M.M** selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis

6. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap jajaran Kepala, Sekretaris, Jajaran TAPD, Kabid Anggaran serta staf di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur (tempat melakukan penelitian) yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
9. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, 09 Januari 2026

Penulis,

Leo Tarnando

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang
anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025)**

ABSTRAK

Leo Tarnando¹, Ahmad Junaidi², Rina Yuniarti³

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked) menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kaur yang memiliki tingkat kemandirian fiskal rendah. Ketergantungan tinggi pada DAU, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 membatasi fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil. Selain itu, tantangan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan realisasi anggaran turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan DAU.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan DAU ditentukan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kaur serta menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional terhadap alokasi DAU di Kabupaten Kaur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur, disertai dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Ditentukan Penggunaannya di Kabupaten Kaur masih bersifat top-down, sehingga meningkatkan akuntabilitas administratif dan menjamin pendanaan layanan dasar, namun membatasi fleksibilitas dan otonomi fiskal daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterlambatan penyaluran dana, serta kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas DAU dalam mendorong pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan desentralisasi fiskal dan praktik pengelolaan DAU earmarked di daerah berkapasitas fiskal rendah.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya.

Leo Tarnando

Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si

Dr. Rina Yuniarti, S.E., M.Ak

**Policy Analysis of Regional Financial Management in the Utilization of Earmarked General Allocation Funds (DAU)
(A Case Study at the Regional Financial and Asset Management Agency, Budget Division, Kaur Regency in 2025)**

ABSTRACT

Leo Tarnando¹, Ahmad Junaidi², Rina Yuniarti³

The management of earmarked General Allocation Funds (DAU) is an important factor in supporting development and public services in Kaur Regency, which has a low level of fiscal independence. High dependence on DAU, the low contribution of Local Own-Source Revenue (PAD), and the national budget efficiency policy in 2025 limit the region's flexibility in adjusting the budget to real needs. In addition, challenges related to transparency, accountability, and the accuracy of budget realization also affect the effectiveness of DAU utilization.

This study aims to analyze regional financial management policies in the utilization of earmarked General Allocation Funds (DAU) implemented by the Regional Government of Kaur Regency, to identify the factors influencing the effectiveness of earmarked DAU management in achieving regional development objectives, and to analyze the impact of the 2025 national budget efficiency policy on DAU allocation in Kaur Regency.

This research employed a qualitative approach using a case study method at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kaur Regency. Data were collected through structured interviews and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the management of earmarked DAU in Kaur Regency remains largely top-down in nature. While this approach enhances administrative accountability and ensures funding for basic public services, it limits regional fiscal flexibility and autonomy. The low level of Local Own-Source Revenue (PAD), delays in fund disbursement, and the national budget efficiency policy in 2025 are identified as the main factors hindering the effectiveness of DAU in promoting regional development. These findings highlight the gap between the objectives of fiscal decentralization and the practical implementation of earmarked DAU management in regions with limited fiscal capacity.

Keywords: Regional Financial Management Policy, Earmarked General Allocation Fund (DAU), Regional Government

**Leo Tarnando
Ahmad Junaidi
Rina Yuniarti**

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
DECLARATION	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Definisi Konseptual.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rasionalitas Jenis Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	45
4.2. Hasil Penelitian	51
4.3. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Simpulan.....	60
5.2. Implikasi Penelitian.....	60
5.3. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 jadwal Kegiatan Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Realisasi APBD Kab. Kaur 2022-2024.....	49
Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Temuan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	34
Gambar 3.1 Analisis Model Miles & Huberman	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Panduan Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 (P. P. R. Indonesia, 2019). Menurut teori kebijakan publik dari (Dye, 2017), pengelolaan DAU melibatkan proses mulai dari mengenali masalah, merumuskan kebijakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi agar dana ini dapat digunakan secara efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali ada masalah seperti kurangnya efektivitas, transparansi, dan ketepatan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal dari (Oates, 2011), DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar-daerah. Dengan DAU, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka terbatas. Selain itu, (Musgrave, 1959) dalam teori keuangan publik menjelaskan bahwa keberhasilan penggunaan dana seperti DAU bergantung pada kemampuan daerah untuk mengelola dana secara efisien dan bertanggung jawab. Di Kabupaten Kaur, DAU menjadi tulang punggung keuangan daerah,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2024 (K. K. R. I. Indonesia, 2024).

Sebagai contoh fenomena nyata yang relevan, di Kabupaten Karangasem, Bali, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan DAU sebesar Rp 21 miliar pada tahun 2025, yang mengakibatkan pembatalan beberapa proyek perbaikan jalan (dari rencana 12 paket menjadi hanya 3) dan saluran irigasi, serta memaksa pemetaan ulang prioritas anggaran untuk mengoptimalkan sisa dana (DetikBali, 2025). Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat membatasi kemampuan daerah dalam mewujudkan pembangunan prioritas, serupa dengan potensi tantangan yang dihadapi Kabupaten Kaur akibat ketergantungan tinggi pada DAU.

Kabupaten Kaur sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan DAU. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, PAD Kabupaten Kaur hanya Rp47,649 miliar, menunjukkan rendahnya kemandirian keuangan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2025). Fenomena ini sejalan dengan temuan A. Dana et al., (2024), yang menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami fluktuasi dalam kemandirian keuangan karena ketergantungan pada dana transfer. Hal ini membuat daerah sulit menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Kabupaten Kaur, yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat, mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk sektor-sektor prioritas yang dibiayai oleh DAU. Sebagai salah satu komponen penting dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DAU

digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketergantungan pada DAU juga mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan lain, seperti PAD dan dana bagi hasil provinsi.

APBD Kabupaten Kaur mencapai Rp990 miliar pada tahun 2025, DAU memainkan peran besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked), seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022, membatasi fleksibilitas daerah dalam menggunakan dana ini. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan kebutuhan nyata daerah, seperti yang ditemukan oleh Uun Ainul Yaqin & Titiek Herwanti (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa DAU sering kali lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik.

Pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur menghadapi tantangan, seperti memastikan dana digunakan untuk prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 dapat memengaruhi jumlah DAU yang diterima, sehingga menimbulkan risiko ketimpangan antara kebutuhan daerah dan dana yang tersedia. Penelitian oleh P. Dana et al., (2024) menunjukkan bahwa DAU dapat membantu mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan efisien.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DAU juga menjadi masalah, seperti yang diungkap oleh Ndraha & Uang (2018). Mereka menemukan bahwa minimnya pengawasan dan perencanaan yang terukur dapat mengurangi efektivitas DAU. Teori siklus kebijakan dari Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, (2020) menawarkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa pengelolaan DAU dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Selain dana transfer pusat, pendapatan daerah Kabupaten Kaur juga mencakup Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD yang hanya sebesar Rp47,649 miliar menunjukkan bahwa potensi lokal belum tergarap secara optimal. Di sisi belanja, tantangan utama terletak pada alokasi anggaran yang harus mengutamakan kebutuhan pembangunan prioritas tanpa mengabaikan efisiensi pengelolaan.

Selain itu, kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah sering kali memengaruhi fleksibilitas Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, meskipun membantu mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, juga dapat membatasi kreativitas daerah dalam menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ketergantungan Kabupaten Kaur pada DAU ditambah dengan rendahnya kontribusi PAD yang hanya sebesar Rp47,649 miliar memperburuk situasi ini, mengingat PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, tantangan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah juga mencakup minimnya integrasi data dan perencanaan yang terukur. Dalam

banyak kasus, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DAU menimbulkan risiko terhadap efektivitas program yang dibiayai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah memerlukan inovasi kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki tata kelola anggaran agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, misalnya, DAU digunakan untuk mendukung program sertifikasi guru, tunjangan khusus, serta bantuan operasional sekolah. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dengan memprioritaskan akses dan mutu layanan pendidikan yang merata. Di sektor kesehatan, DAU mendukung program bantuan operasional kesehatan yang memastikan pelayanan kesehatan dasar tersedia untuk masyarakat luas.

Dampak positif lainnya terlihat dalam pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan fasilitas umum lainnya yang dibiayai oleh DAU. Namun, meskipun manfaatnya besar, pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya masih menghadapi kendala, seperti lambatnya realisasi anggaran dan kesenjangan dalam distribusi manfaat. Kabupaten Kaur, sebagai daerah yang sangat bergantung pada DAU, perlu memastikan bahwa alokasi dan implementasi program-program yang dibiayai oleh DAU dilakukan dengan efisiensi tinggi dan tepat waktu agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Lebih jauh, keberhasilan pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya tidak hanya bergantung dengan pada alokasi anggaran semata tapi juga dengan mekanisme monitoring serta evaluasi. Di Kabupaten Kaur, pemanfaatan DAU oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Anggaran perlu dikaji lebih mendalam, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2025. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi alokasi DAU, sehingga perlu dipastikan bahwa penggunaannya tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun telah banyak penelitian tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah atau pengurangan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian terdahulu umumnya fokus pada DAU block grant sebelum tahun 2023 atau analisis kuantitatif dampak ekonomi secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme teknis pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di tingkat badan pengelola keuangan daerah, dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional 2025 terhadap alokasi dan realisasi DAU, serta faktor-faktor penghambat optimalisasi di daerah dengan ketergantungan tinggi seperti Kabupaten Kaur. Celah ini mencerminkan diskoneksi antara teori desentralisasi fiskal dengan praktik lapangan, di mana rendahnya transparansi, kemandirian fiskal, dan keselarasan perencanaan berbasis kinerja masih menjadi isu utama yang belum banyak dieksplorasi secara spesifik pada konteks DAU *earmarked* setelah 2023.

Pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti mendukung pendidikan (misalnya, program sertifikasi guru) dan kesehatan (bantuan operasional kesehatan). Namun, tantangan seperti keterlambatan realisasi anggaran dan ketidakmerataan manfaat masih sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya di Kabupaten Kaur, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dengan mengacu pada teori desentralisasi fiskal (Oates, 2011), keuangan publik (Musgrave, 1959), dan kebijakan publik (Dye, 2017) dan (Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, 2020), serta didukung oleh penelitian terdahulu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan DAU ditentukan mengurangi kewenangan daerah dalam mengalokasikan dana sesuai prioritas lokal dan sering menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan ditambah daerah khususnya Kabupaten Kaur dengan PAD rendah sangat bergantung pada dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
- b) Masih terdapat masalah dalam transparansi, pengawasan, dan perencanaan yang terukur dalam penggunaan DAU. Hal ini menyebabkan risiko

penyalahgunaan, keterlambatan realisasi anggaran, serta distribusi manfaat yang tidak merata kepada masyarakat.

- c) Kebijakan efisiensi anggaran nasional berpotensi memangkas besaran DAU yang diterima daerah, Khususnya Kabupaten Kaur yang sangat bergantung pada DAU, sehingga dapat menghambat pencapaian target pembangunan prioritas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan DAU ditentukan di pemerintah daerah Kabupaten Kaur?
- b) Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan DAU ditentukan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kaur?
- c) Bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional terhadap alokasi DAU di Kabupaten Kaur??

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada tulisan ini antara lain :

- a) Menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- b) Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan DAU ditentukan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kaur.

- c) Menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional terhadap alokasi DAU di Kabupaten Kaur

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki nilai manfaat yang melibatkan beberapa aspek, seperti berikut:

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta keilmuan mengenai Analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan penggunaannya Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025 secara tepat.

- b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Kaur

Melalui adanya penelitian / pengamatan ini dapat menjadi sebuah gambaran serta referensi saat membuat kebijakan, khususnya dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan penggunaannya, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan yang dilakukan Kabupaten Kaur dalam mendorong pembangunan sehingga bermanfaat untuk masyarakat menjadi lebih optimal lagi.

- 2) Bagi Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Fakultas ekonomi dan Bisnis khususnya pada program studi Magister Manajemen, Penelitian ini berkontribusi dalam hal referensi peneliti selanjutnya terkait memberikan kontribusi dalam pengembangan teori